

# PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI



## Liberalisasi Perdagangan **Miskinkan Petani**

Liberalisasi Perdagangan telah menghancurkan kehidupan petani. Kawasan-kawasan pertanian yang ada di desa-desa, saat ini mempunyai tingkat kekurangan gizi dan kemiskinan yang paling tinggi.

## Usir Pascal Lamy, Keluarkan WTO dari pertanian

Pascal Lamy, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) datang ke Jakarta pada tanggal 20 -21 Februari ini. Hal ini jelas terkait dengan usaha membangkitkan kembali kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang sempat mati suri beberapa bulan lalu. Misi lainnya kemungkinan untuk mengejar agenda Kongres AS untuk melegalkan perdagangan bebas yang lebih luas.

Sejak negosiasi di WTO mati suri, sudah banyak upaya untuk menghidupkan kembali rejim perdagangan global ini. Inisiasi selalu dilakukan oleh negara-negara besar yang mendominasi forum WTO seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang.

Sejak berdiri tahun 1995, sekitar 80 persen lebih volume perdagangan bebas dunia diraup oleh perusahaan multinasional. Perlawanan rakyat pun datang. Hal ini semakin terbukti dari protes gerakan rakyat mulai dari pertemuan Seattle, Cancun, Geneva sampai Hong Kong. Protes masif ini menandakan bahwa WTO tidak diinginkan rakyat.

Batu sandungan terbesar kesepakatan di WTO adalah negosiasi pertanian. Indonesia, sebagai salah satu pentolan kelompok negara G-33 dianggap WTO bisa mengurai benang kusut perundingan rejim perdagangan dunia tersebut.

Proposal G-33 dengan produk khusus dan mekanisme pengamanan khusus (SP/SSM) adalah salah satu isu mengemuka yang memacetkan perundingan. Proposal ini sudah ditentang banyak negara, mulai dari AS, Uni Eropa, hingga Australia. Banyak pula negara yang mengambil posisi moderat, dan tak sedikit banyak yang bertahan.

Di lain pihak, SP/SSM ternyata bukanlah konsep yang cukup maju untuk mengatasi kerugian petani kecil di seluruh duniaterutama di negara miskin dan berkembang. Proposal ini jelas-jelas masih berada di bawah mekanisme WTO secara keseluruhan, dan rentan ditukarkan (trade off) dengan usulan lain, seperti akses pasar, bahkan konsesi-konsesi lain macam industri dan jasa. Posisi Indonesia secara historis juga sebagai good boy, yang cenderung setuju meskipun menerima banyak kerugian dalam negosiasi WTO.

Dari sisi ini, kami memandang bukan proposal seperti SP/SSM yang bisa menguntungkan petani. Melainkan lebih jauh lagi, WTO harus keluar dari pertanian itu sendiri. Karena ekspansi pasar pertanian internasional telah membuat untung AS, Uni Eropa, dan perusahaan transnasional seperti Cargill, Monsanto, BASF, Tyson, Charoen Pokpand, dan lainnya.

Maka dari itu, kunjungan Pascal Lamy yang membawa misi utama untuk menghidupkan negosiasi WTO yang mati suri harus ditentang.

## PENGUMUMAN PINDAH ALAMAT

**Mulai bulan Februari tahun 2007,  
Serikat Petani Jawa Timur (SPJT)  
dan  
Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB)  
sudah menempati alamat baru.**

### Sekretariat SPJT beralamat di:

Jl. Jambangan Gg. III, No.3, RT/RW 1/1,  
Kelurahan Jambangan,  
Kecamatan Jambangan.  
SURABAYA 60232

Telp. 031 8283154  
Email: spjatim@yahoo.com

### Sekretariat SPSB beralamat di:

Jl. Mutiara No.12, Tunggul Hitam-Air  
Tawar. Padang Utara.  
PADANG- SUMATERA BARAT 25312

Telp. 0751 444860  
Email: spsb@yahoo.com



**Penanggung Jawab:** Henry Saragih  
**Pemimpin Umum:** Zaenal Arifin Fuad  
**Pemimpin Redaksi:** Achmad Ya'kub;  
**Dewan Redaksi:** Ali Fahmi, Agus Rully,  
Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis,  
Irma Yani;  
**Redaktur Pelaksana:** Cecep Risnandar  
**Redaktur:** Muhammad Ikhwan, Tita  
Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;  
**Reporter:** Chaspul(Sumatera Utara),  
Tyas Budi Utami (Jambi), Harry Mubarak

(Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus  
Moa (NTT). **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:**  
Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;  
**Penerbit:** Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)  
**Alamat Redaksi:** Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan  
12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email:  
pembaruantani@fspior.id website: www.fspior.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan  
dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas  
yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan  
dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

## DAFTAR ISI

Liberalisasi Perdagangan Miskinkan Petani	4-5
Sekilas Tentang Sejarah Gerakan Perempuan	6-7
Impor Beras Sudah Melampaui Batas	8-9
LAPORAN DARI NYELENI	
Forum Petani untuk Kedaulatan Pangan	10-11
Cerita dari Nairobi	12-13
Penangkapan di Jampang Melanggar Hak Asasi Petani	14
Pertemuan Petani Perempuan	15



# Go to hell, Lammy!

maju sendiri sangat protektif terhadap pertaniannya.

Tentu saja, ini membuat negara miskin dan berkembang menjadi berang. Salah satunya adalah negara kelompok G33 yang dimotori Indonesia. Kelompok yang terdiri dari 46 negara ini meminta berbagai subsidi ekspor untuk produk pertanian negara maju di kurangi. Selain itu, G33 juga meminta perlakuan berbeda untuk produk khusus (SP) dan mekanisme perlindungan khusus (SSM) bagi produk pertanian.

Menurut ketua G33 yang juga Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu, langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi serangan produk pertanian dari negara-negara maju yang dijual dengan harga lebih murah ketimbang produk pertanian sejenis di negara anggota G-33. Dengan kata lain, apabila negara-negara maju menyetujui permintaan tersebut dan menghapuskan subsidi ekspor pertanian, maka kelompok G33 bersedia melanjutkan perundingan-perundingan WTO.

Sementara itu, sebagian kalangan menilai langkah yang ditempuh kelompok G33 tidak akan efektif. "Tawaran pemotongan subsidi komoditas pertanian AS dan Eropa hanya di atas kertas," ujar Direktur Eksekutif Institut for Global Justice, Bonnie Setiawan kepada sebuah harian di Jakarta.

Selama ini AS menawarkan pemotongan total subsidi hingga US\$15 miliar dan Eropa menjanjikan pemotongan hingga 70%. Tawaran tersebut, lanjut Bonnie, hanya taktik saja sebab di sektor lain mereka menaikkan subsidi dan kuota pajak komoditas pertanian negara-negara berkembang.

"Bahkan jika UE menawarkan penurunan subsidi hingga 27 miliar euro dan AS hingga 15 miliar dollar, produk mereka masih lebih murah daripada produk lokal," kata Bonnie.

Penentangan lebih keras datang dari FSPI. Tawaran kelompok G33 dinilainya bukan hanya tidak efektif tapi bisa menjerumuskan anggotanya ke dalam kesepakatan yang lebih merugikan lagi. Kelompok G33 harus berani menolak perundingan WTO.

Sekjen FSPI Henry Saragih mengungkapkan, "Dalam WTO tidak akan ada kesepakatan yang adil. Jadi, lebih baik tidak ada kesepakatan dibanding kesepakatan yang tidak adil," ujarnya.

Pendapat Henry ini bukan tanpa alasan, mengingat perundingan-perundingan di WTO sangat didominasi sekelompok negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Kanada. Bahkan, negara maju mempunyai ruang tersendiri untuk menekan negara-negara lain agar mengikuti kesepakatan yang telah dirancangnya. Wahana itu dinamakan *green room*. Mekanisme tersebut berlaku informal namun itulah yang sesungguhnya bekerja dalam perundingan-perundingan WTO.

Selain itu, tekanan kepada negara-negara miskin dan berkembang dilancarkan pula secara bilateral. Ditambah lagi dengan lobi-lobi yang dilakukan Dirjen WTO Pascal Lamy. Salah satunya dalam forum G33 yang sedang diselenggarakan di Jakarta ini.

"Kedatangan Pascal Lamy membawa misi untuk menyukseskan kesepakatan WTO yang tidak adil itu. Oleh karena itu, kami memprotes kehadiran Lamy di Jakarta," ucap Henry.

Atas dasar itu, Henry mengangap perundingan di WTO tidak demokratis. Untuk menyelamatkan jutaan petani di negara-negara miskin, WTO harus dikeluarkan dari pertanian. "Usir WTO dari pertanian! Kelompok negara miskin dan berkembang harus berani menegakkan kedaulatan pangannya," tandas Henry.

CECEP RISNANDAR

**G**o to hell! Teriakan itu ditujukan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Pascal Lamy yang sedang menghadiri pertemuan G33 tanggal 21 Februari ini di Hotel Borobudur, Jakarta. Ratusan demonstran dari Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) yang beraliansi dalam Gerakan Rakyat Lawan Nekolim (Gerak Lawan) memenuhi pelataran jalan menuju hotel tersebut.

Aktivistis gerakan rakyat mensinyalir kedatangan Lamy ke Jakarta bertujuan untuk mengintervensi pertemuan kelompok negara G33.

Seperti telah diketahui, beberapa waktu lalu kesepakatan-kesepakatan dalam WTO mengalami jalan buntu. Hal itu terjadi karena penentangan sejumlah negara miskin dan berkembang terhadap kesepakatan di sektor pertanian.

Negara miskin dan berkembang menganggap kesepakatan WTO sangat merugikan petaninya. Namun, kelompok negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat tetap agresif untuk menekan negara-negara lain membuka pasarnya. Padahal negara

# Liberalisasi Perda Miskin

## Bagaimana kesepakatan liberalisasi perdagangan di negara-negara miskin?

■ CECEP RISNANDAR

Melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara maju lainnya secara agresif mendorong negara-negara miskin dan berkembang untuk membuka pasar dengan mengurangi tarif impor produk-produk pertanian. Agenda ini akan menguntungkan negara maju dan segelintir perusahaan-perusahaan besar, namun akan mengancam penghidupan para petani di negara miskin yang merupakan 96 persen dari seluruh petani di dunia



Awan hitam menyelimuti bumi. Tanda hujan akan turun. Suasana mendung itu tampak pula di wajah para petani Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tampak para petani bergegas mengepaki hasil panennya. Cekatan benar mereka membungkus bawang merah ke dalam karung untuk dibawa pulang.

Dulu saat-saat panen adalah saat bersuka cita. Namun, bagi petani di Brebes tidak demikian. Sarti (46), seorang petani bawang merah di Kecamatan Larangan hanya bisa mengelus dada, karena hasil panennya tidak menutupi ongkos produksi. Apalagi, setelah impor bawang merah masuk ke Indonesia.

Keluhan itu tidak hanya muncul dari mulut Sarti saja. Hampir sebagian besar petani bawang merah di Brebes mengeluhkan anjloknya harga. "Petani tak akan dapat untung," keluh petani yang bernama Sutomo seperti ditulis harian Sinar Harapan.

Impor kian memberatkan petani karena harga di pasaran semakin terpuruk. Puncaknya, pada pertengahan Januari lalu, petani bawang merah di Brebes berdemo menolak impor bawang merah yang merusak harga di tingkat petani. Mereka meminta pemerintah memproteksi petani dari serbuan bawang impor.

Pemerintah pun tampaknya tak mau disalahkan para petani. Dengar saja jawaban Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian, Achmad

# gangguan kan Petani

## mengancam kehidupan petani

Dimyati, yang diutarakannya kepada kantor berita Antara. "Saat ini untuk melakukan pelarangan impor terhadap bawang merah yang masuk ke Indonesia jelas tidak mungkin karena melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)," ujarnya.

Sebagai jalan keluarnya, Pak Dirjen menjanjikan hambatan non tarif bagi bawang impor. Namun tetap saja, pemerintah kelihatannya tidak berdaya berhadapan dengan aturan-aturan yang ditetapkan WTO. Kesepakatan pertanian di WTO mewajibkan negara-negara anggotanya menghapus hambatan non tarif dan membuka pasar bagi produk impor. Jadi, sudah dapat dipastikan, WTO bukan tempat untuk membicarakan perlindungan bagi petani.

Rejim liberalisasi perdagangan internasional sudah sejak lama memaksa petani berlahan sempit di negara-negara miskin dan berkembang untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan agribisnis raksasa. Tentunya yang menjadi korban adalah para petani kecil.

Keadaan ini tidak hanya menimpa petani bawang merah saja. Tapi semua petani di hampir semua negara miskin dan berkembang. Menurut catatan Oxfam, sebuah organisasi non profit internasional, pada tahun 1995 Dana Moneter Internasional (IMF) memaksa Haiti untuk memotong tarif impor beras, sehingga impor meningkat lebih dari 150 persen antara tahun 1994 sampai 2003.

Hasilnya, tiga dari empat piring nasi yang disantap di Haiti adalah beras impor dari Amerika Serikat. Pihak yang paling diuntungkan dari pemotongan tarif impor ini adalah perusahaan yang bernama *Riceland Foods of Arkansas*, penggiling padi terbesar di dunia. Dalam setahun keuntungan *Riceland* meningkat drastis sebesar \$123 juta atau sekitar 1,2

triliun rupiah. Sebagian besar karena kenaikan ekspor ke Haiti dan Cuba.

Di sisi lain, *Riceland* telah menghancurkan petani di Haiti, dimana kawasan-kawasan penanam padi sekarang mempunyai tingkat kekurangan gizi dan kemiskinan yang paling tinggi.

Tidak hanya itu, di Ghana tekanan Bank Dunia dan IMF telah menimbulkan tingginya aliran impor beras. Ini telah membuat parlemen untuk menyetujui naiknya tarif pada tahun 2003. Namun karena tekanan IMF, pemerintah Ghana berbalik arah dari komitmen tersebut. Cerita selanjutnya dapat ditebak, petani padi di Ghana kelabakan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oxfam juga menengarai, kedepannya negara-negara maju akan memaksa negara lain untuk menurunkan tarif impor beras mereka. Dalam menghadapi impor beras, mereka tidak akan diijinkan untuk menaikkan tarif untuk melindungi petani dan ekonomi pedesaan.

Di Indonesia, rezim liberalisasi perdagangan mulai mengganas sejak pemerintah menandatangani kesepakatan dengan IMF pada tahun 1997. Badan dunia ini memaksakan pemikiran neoliberal dalam sistem perekonomian negara. Keran impor dibuka lebar-lebar, berbagai institusi di privatisasi.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia telah menotifikasikan kesepakatan WTO untuk menurunkan tarif impor beras dan membuka pasar minimum sebesar 70 ribu ton per tahun. Akibatnya, sejak saat itu beras impor membanjiri pasar domestik setiap tahunnya. Tatkala panen raya, petani

padi di Indosia selalu dirundung malang karena harga gabah seringkali tertekan.

Tekanan tidak hanya menimpa petani di negara-negara miskin saja. Di Korea Selatan, para petani beras dan sayuran sangat menderita akibat serbuan pangan impor murah. Produk dumping dari negara-negara lain telah membunuh jutaan petani disana.

Para petani pun tidak tinggal diam. Protes besar-besaran melanda negeri itu. Setiap perjanjian liberalisasi perdagangan, baik itu WTO, Forum Ekonomi Asia Pasifik (APEC), maupun perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lainnya (FTA) selalu mendapat tentangan keras dari petani. Korban pun sudah banyak berjatuh.

Ditengah sebuah protes besar rakyat Korea selatan terhadap pertemuan APEC pada akhir 2005 di Seoul, beberapa petani nekat bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi dengan himpitan perdagangan bebas yang menghantui negeri itu.

Bagi petani, WTO bukan tempat negosiasi perdagangan yang adil. Apapun yang dilakukan WTO tidak akan pernah mendatangkan keadilan. Hal itu, terungkap dalam pandangan Sekjen Federasi Petani Indonesia (FSPI) Henry Saragih. Ia memilih sikap yang jelas, WTO harus keluar dari pertanian!

Henry menilai organisasi itu sangat tidak demokratis dan didominasi oleh sekelompok negara-negara besar saja. Oleh karena itu, gerakan kaum tani diseluruh dunia bersatu menentang WTO. "Itu sudah menjadi sikap gerakan petani," tandas pria yang juga menjabat koordinator umum gerakan petani internasional La Via Campesina ini.

# Sekilas Tentang Sejarah Gerakan Perempuan



■ WILDA TARIGAN

Pada tanggal 8 maret setiap tahunnya, diseluruh dunia diperingati sebagai hari perempuan internasional, berbagai pihak terutama yang mengusung isu hak-hak perempuan akan menggelar berbagai agenda untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Umumnya kegiatan yang digelar adalah melakukan aksi - aksi turun ke jalan untuk melakukan tekanan pada pemerintah dan menariakkan berbagai persoalan ekonomi, sosial dan posisi politik perempuan, yang secara khusus berkaitan dengan keadilan dan tidak deskriminasi.

Gerakan Perempuan Di Indonesia  
Gerakan perempuan di Indonesia tidak bisa lepas dari semangat pembebasan dari penjajahan, ditandai dengan perjuangan kartini, Roehana Kudus, Cut nyak Dien, Dewi Sartika, Kristina martha Tiahahoe dan banyak tokoh perempuan lainnya yang telah mencatatkan namanya dalam perjuangan bangsa ini. Dan rasa ketertindasan ini juga yang mengilhami terbentuknya organisasi perempuan pada masa itu. Poetri Mardika (1912), salah satu organisasi perempuan yang kelahirannya memang mendapat dukungan dari Boedi Oetomo (organisasi laki-laki). Dalam perkembangannya, Poetri Mardika pernah mengajukan mosi kepada Gubernur Jenderal pada tahun 1915 agar perempuan dan laki-laki diperlakukan sama di muka hukum.

Setelah organisasi ini berdiri banyak perkumpulan perempuan baik yang didukung oleh organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan sendiri. Sebut saja misalnya, Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun - PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah atas bantuan Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924). (Sukanti

Suryochondro: 1995).

Salah satu aksi yang paling mencolok, yaitu pada tahun 1926 di Semarang yang menuntut perbaikan kondisi kerja bagi buruh perempuan, dengan memakai caping kropak. Selama pemberontakan komunis pada tahun 1926 banyak perempuan ditahan bukan hanya karena mereka membantu suami mereka, tetapi juga karena aktivitas mereka sendiri. Bersama dengan laki-laki, banyak perempuan yang diasingkan ke Boven Digul, sebuah kamp konsentrasi Belanda di Irian Jaya. Sukaesih dari Jawa Barat, dan Munasiah dari Jawa Tengah termasuk di antara perempuan-perempuan tersebut. (Saskia E. Wieringa: 1988). Semangat nasionalisme semakin berkobar di kalangan organisasi perempuan, sehingga pada tanggal 22 Desember 1928, diadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, dan kongres inilah sebagai cikal bakal diperingati sebagai *Hari Ibu* di Indonesia.

Pada awal berdirinya, upaya-upaya yang dilakukan adalah perhatian pada lingkungan keluarga dan masyarakat, kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam), pendidikan dan perlindungan anak-anak, pendidikan kaum perempuan, perempuan dalam perkawinan, mencegah perkawinan anak-anak, nasib yatim piatu dan janda, pentingnya peningkatan harga diri perempuan, dan kejahatan kawin paksa.

Pada tahun 1930, Suwarni Pringgogidgo, mendirikan organisasi perempuan yang aktif dalam perjuangan politik, yaitu Istri Sedar di Bandung dan menerbitkan jurnal Sedar. Perjuangan lain, adalah upaya gerakan perempuan untuk menentang poligami yang dipandang merugikan perempuan. Pada tahun yang sama dengan berdirinya Istri Sedar tahun 1930-an, para aktivis perempuan dalam Sarekat Rakyat mengorganisasikan demonstrasi politik untuk buruh perempuan dengan tuntutan kenaikan upah, kesejahteraan buruh dan keselamatan kerja.

Perkembangan gerakan perempuan semakin maju, ketika dalam Kongres



Perempuan II, Maret 1932, isu nasionalisme dan politik muncul, selain soal perdagangan perempuan, hak perempuan dan penelitian keadaan sanitasi di kampung serta tingginya angka kematian bayi. Ki Hajar Dewantara, dalam pidatonya mengatakan, sangat terkesan dengan perjuangan feminis di Turki, Cina, Persia, dan India, yang memberikan kontribusi sangat besar bagi suksesnya perjuangan nasional di negara mereka.

Pada tahun 1935 dibentuk Badan Penyelidikan Perburuhan Kaum Perempuan salah satunya rapat umum untuk perempuan buruh batik di Lasem Jawa Tengah, membentuk Badan Pemberantasan Buta Huruf, Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (Sukanti Suryochondro: 1995).

Pada Kongres Perempuan III, setelah melakukan pembubaran PPII, mulai dimunculkan isu tentang hak suara perempuan. Perempuan terus memperjuangkan hak politik atau keterwakilan perempuan, dengan memperjuangkan Maria Ulfa menjadi anggota Volksraad, meskipun gagal. Maria Ulfa kemudian terpilih menjadi menteri Sosial pada Kabinet Syahrir II (1946) dan S.K. Trimurti menjadi menteri Perburuhan pada Kabinet Amir Sjarifuddin (1947-1948). Pada pemilu 1955, gerakan perempuan Indonesia berhasil menempatkan perempuan sebagai anggota parlemen (Budi Wahyuni, dkk.: 2002).

#### Sejarah Hari Perempuan Internasional

Mengapa justru 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional? Menurut sejarahnya secara singkat, adalah sebagai berikut : Pada tahun 1857 di New York, AS, kaum buruh tekstil yang kebanyakannya perempuan, mengadakan demonstrasi, menuntut perbaikan kerja. Demonstrasi ini mengalami perlawanan keras dari pihak kepolisian. Pada tahun 1907 di Stuttgart - Jerman, diadakan permusyawaratan Perempuan Sosialis Internasional Pertama. Tahun 1908 di New York - AS, terjadi lagi demonstrasi yang diikuti ribuan buruh-perempuan yang menuntut perbaikan nasib, menuntut hak-pilih, memilih dan dipilih dan melarang menggunakan tenaga kerja anak-anak.

Tahun 1910, dalam sebuah konferensi internasional di Kopenhagen, Denmark, Clara Zetkin mengusulkan agar pemogokan para buruh garmen di Amerika Serikat itu dijadikan sebagai Hari Perempuan

Internasional. Usulan tersebut disepakati secara aklamasi oleh lebih dari 100 perempuan dari 17 negara peserta konferensi.

Hari Perempuan Internasional tersebut ditetapkan untuk menghormati gerakan menuntut hak-hak untuk kaum perempuan, termasuk di dalamnya hak untuk memilih (dikenal dengan hak pilih). Sehingga setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai

Tahun 1978, Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) telah memutuskan bahwa 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional. Keputusan ini berdasarkan gerakan sejarah kebangkitan perempuan se-dunia. Gerakan perempuan menuntut keseimbangan hak, penghargaan antara pria dan wanita, kesetaraan derajat. Termasuk dan terutama dalam perkara persamaan hak-politik seperti hak-suara, memilih dan dipilih di badan-badan perwakilan legislatif. Semua gerakan ini dimulai pada akhir abad ke 19. Gerakan Perempuan mulai memasuki tahap dan bersifat internasional ketika gerakan ini secara serentak melawan kemiskinan, kekerasan dan anti-kemanusiaan.

Tahun 1910 di Kopenhagen - Denmark, diselenggarakan permusyawaratan Perempuan Sosialis Internasional Kedua. Ketika itu Clara Zetkin ( 1857 - 1933 ) yang mewakili Partai Sosialis Jerman, mengusulkan agar Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tahun. Usul Clara Zetkin ini disetujui dan disambut hangat oleh 100 orang wakil-wakil organisasai perempuan dari 17 negara yang hadir ketika itu. Dan berbareng dengan rentang waktu itu, untuk pertama kalinya Parlemen di Finlandia memilih tiga orang wakil buat duduk sebagai anggota legislatif negara tersebut. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya gerakan perempuan terus menanjak di bagian banyak negerinegeri yang belum mengakui gerakan ini. Setiap tanggal 8 Maret, perayaan dan peringatan Hari Perempuan Internasional ini terus berkembang. Tuntutannya juga berkembang, misalnya menuntut 8 jam-kerja.

Untuk pertama kalinya pada tahun 1911 Hari Perempuan Internasional dirayakan di negara-negara industri, seperti Jerman, Austria, Denmark, Finlandia, Swiss dan Amerika Serikat. Pada tahun 1914 di Jerman, ribuan orang terutama kaum wanita ikut aktif berdemonstrasi menentang ancaman Perang Dunia I. Karena luasnya dan dianggap berbahaya

oleh pemerintah, seorang tokoh perempuan, Rosa Luxemburg ditangkap dan ditahan. Tahun 1917 pada tanggal 8 Maret di St. Petersburg - Russia, terjadi pemogokan kaum buruh tekstil buat pertama kalinya. Dan dibawah pimpinan Alexandra Kollontai, seorang buruh-perempuan. Tuntutannya tentang perbaikan nasib, suasana kerja dan menuntut agar memenuhi kebutuhan sandang-pangan. Pemogokan sekali ini, benar-benar secara total, sebab diikuti oleh kaum-buruh dari pabrik-pabrik lainnya. Tahun 1916 Clara Zetkin bersama Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht membentuk Spartakusbund dan kemudian setelah selesainya revolusi tahun 1917 - Revolusi Oktober - mereka menggabungkan diri dengan Partai Komunis Jerman. Dua orang wanita ini tetap memegang pimpinan sekretariat Gerakan Perempuan Internasional.

Dengan adanya perpecahan golongan sosialis Eropa dan Amerika, maka sejak 1922 peringatan dan perayaan 8 Maret juga terpecah cara dan wilayah peringatannya. Barulah

Semangat nasionalisme semakin berkobar di kalangan organisasi perempuan, sehingga pada tanggal 22 Desember 1928, diadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, dan kongres inilah sebagai cikal bakal diperingati sebagai *Hari Ibu di Indonesia*.

pada tahun 1978 PBB mengakui bahwa hari 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional.

Di zaman Orde Lama, di mana Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Sukarno, hak-hak azasi mendapat kebebasan dan organisasi-organisasi perempuan revolusioner berkembang di seluruh wilayah Indonesia, maka pada saat itu hari 8 Maret sebagai Hari Wanita Internasional diperingati secara luas di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi sejak berkuasanya Orde Baru rezim fasis Suharto, dimana hak azasi manusia dibungkam dan organisasi-organisasi perempuan revolusioner dimusnahkan, maka sejak saat itu hari 8 Maret tak pernah diperingati sebagaimana mestinya. Setelah fasis Suharto ditumbangkan, semoga dimasa-masa mendatang hari bersejarah ini bisa diperingati, demi untuk meningkatkan peranan kaum perempuan dan harkat bangsa Indonesia, terutama di mata dunia.

# Impor Beras Sudah Melampaui

■ ACHMAD YA'KUB

Kebijakan pemerintah dalam untuk memutuskan impor beras dengan alasan bencana, harga beras yang melonjak, maupun stok beras yang ada di pemerintah adalah hal yang terlalu panik, mengada-ada menghina petani, dan melampaui batas kewajaran. Hal itu disampaikan Sekertaris Jenderal Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) Henry Saragih di Jakarta, Kamis (15/2).

FSPI menyatakan itu untuk menanggapi kebijakan impor beras dan operasi pasar tanpa batas yang

banyak untuk stok di rumah tangga ataupun bantuan untuk bencana," tegas Henry.

Henry juga menjelaskan, beras sebenarnya tersedia di pasar, terutama di pedagang. Belum lagi jika melihat stok gabah yang akan segera panen. Saat ini menurut laporan anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) di Kabupaten Karawang, petani sedang panen di daerah kecamatan Teluk Jambe Barat, teluk Jambe Timur, Lemahabang, Telaga Sari, dan Tirta Mulya. Luasan panen pada lima kecamatan tersebut mencapai 12.000 ha, wilayah ini dialiri irigasi teknis. Kemudian menurut keterangan Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pertanian di berbagai media massa bahwa di Jawa Tengah akan panen yang menghasilkan 310.000 beras dan di Jawa Timur sebanyak 300.000 ton beras. Kemudian di Sulawesi Selatan stok di gudang Bulog masih tersedia, karena pada musim paceklik diserap 52.507 ton dan waktu dekat ini akan segera panen. Belum lagi stok beras hasil impor yang ditetapkan pada akhir 2006 yang sebanyak 500.000 ton beras telah masuk ke Indonesia pada bulan Januari 2007 sebanyak kurang lebih 250.000 ton beras. Sementara, sisanya seharusnya sudah masuk pada bulan Februari atau awal Maret 2007.

Mengenai persoalan harga beras yang melonjak, Henry menilai reaksi pemerintah melakukan pengadaan beras dari impor dan mengadakan operasi pasar tanpa batas adalah tindakan kalap. "Pemerintah lupa, bahwa ongkos angkut, ongkos penggilingan dan operasional lainnya

meningkat sejak bulan Oktober 2006, tepatnya sejak pemerintah menaikkan harga BBM sekitar 126 persen dan harga pupuk yang naik sejak bulan Mei 2006 lalu. Sebenarnya tidak hanya harga beras yang naik tapi juga harga gula, minyak goreng, daging, dan telur ayam rata-rata kenaikan sekitaran 200-500-an rupiah," tambah dia.

Menurut perhitungan Henry, harga beras yang meningkat tinggi juga dipicu ulah pedagang dalam hal ini pengusaha beras. padahal harga GKP di Karawang saat ini misalnya masih sekitaran Rp. 2.500/kg, maka logikanya harga beras seharusnya paling mahal adalah sekitaran Rp. 3.800/kg bukan seperti saat ini IR 64 kualitas III saja mencapai Rp. 5000/kg. Laba yang besar bukan ditangan petani tetapi di pihak pemilik penggilingan ke atas yaitu pedagang beras besar. Hal ini nyata terlihat dari disparitas harga gabah dan beras yang sungguh fantastis dan melampaui batas kewajaran.

Kemudian soal mundurnya musim tanam akibat bencana banjir yang melanda lahan pertanian dinilainya terlalu dilebih-lebihkan. Mengutip data yang disampaikan dinas pertanian Jawa Barat, Henry menyatakan sekitar 130.000 ha sawah terendam banjir dan puso 35.000 ha ternyata tidak sebesar pada masa Januari-Mei 2005, ketika kekeringan melanda 132.969 ha lahan sawah diseluruh Indonesia. Lagi pula dari total 11, 89 juta ha lahan pertanian padi setiap tahun sudah diperhitungkan rata-rata kehilangan hasil produksi padi sekitar 5% akibat banjir dan hama.

Pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai ketua Dewan Ketahanan Pangan harus meninjau kembali Inpres 13/2005 mengenai kebijakan perberasan yang menjadi patokan BULOG untuk membeli beras atau gabah dari petani tidak relevan lagi untuk saat ini. Terutama mengenai harga pembelian pemerintah untuk GKP dipenggilingan yaitu sebesar Rp. 1.730/kg dan harga beras yang Rp 3.550/kg. Sementara BULOG sendiri menjual beras dalam OP-nya mencapai Rp. 3.700.

dilakukan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla beserta jajarannya. "Menurut kami, dalam situasi bencana jumlah penduduk dan konsumsi beras adalah tetap secara nasional, hanya pada beberapa wilayah saja seperti Jakarta yang terkesan menyerap



# Batas!

Lebih lanjut, Henry menilai impor beras melampaui batas dari segi politik. Karena keputusan hanya diambil oleh Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian, dan Wakil Presiden—tanpa meminta masukan dari Menteri Pertanian, yang notabene bertanggung jawab dalam masalah pangan. Dalam pengetahuan rakyat, Menteri Pertanian pula yang seharusnya mengetahui teknis dan detail padi dan beras, yang merupakan produk pangan utama di negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan ini diambil atas dasar pandangan ekonomi belaka, dan bahwa beras dianggap sebagai semata-mata komoditas.

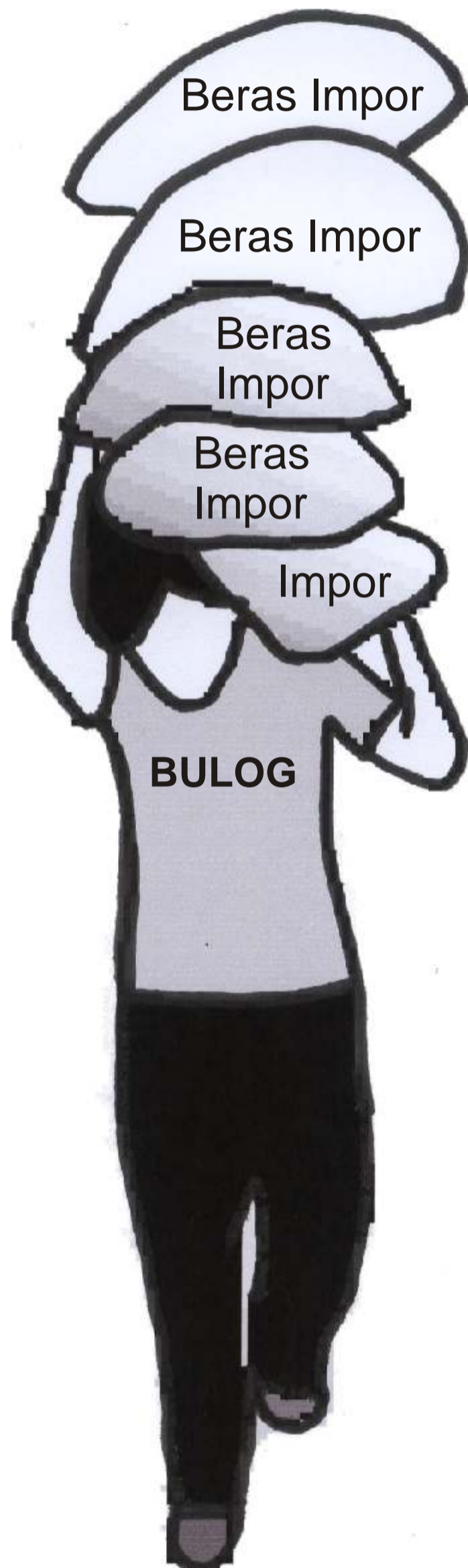
Oleh karena itu, FSPI sebagai organisasi petani menyarankan arah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam jangka pendek. BUI antara lain: *pertama*, pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai ketua Dewan Ketahanan Pangan harus meninjau kembali Inpres 13/2005 mengenai kebijakan perberasan yang menjadi patokan BULOG untuk membeli beras atau gabah dari petani tidak relevan lagi untuk saat ini. Terutama mengenai harga pembelian pemerintah untuk GKP dipenggilingan yaitu sebesar Rp. 1.730/kg dan harga beras yang Rp 3.550/kg. Sementara BULOG sendiri menjual beras dalam OP-nya mencapai Rp. 3.700. Dan parahnya lagi, OP pasar itu banyak sekali di borong oleh pedagang beras.

*Kedua*, dengan harga beras yang mahal dan tidak terkendali sebenarnya tidak hanya kaum miskin perkotaan, buruh dikota tetapi juga petani miskin/gurem, buruh tani yang

juga menjadi konsumen beras akan tertekan dan makin sulit. Untuk itu intervensi pemerintah masih relevan terutama dalam penertiban para pengusaha beras, penggilingan dan mengamankan jalur distribusi beras. Pemerintah harus memastikan stok beras ada ditangannya, bukan ditangan pengusaha beras. Mahalnya harga beras bukan karena kelangkaan beras. Saat ini banyak daerah masih tersedia, tetapi yang menjadi persoalan adalah kinerja pemerintah seperti menko perekonomian, menteri

Perdagangan, ataupun wakil presiden sendiri yang harus dievaluasi dalam menetapkan status bahaya stok beras. Karena hal ini dapat diramalkan termasuk untuk cadangan pangan dan bantuan bencana. Selain itu juga, perlu adanya penindakan dan pembukaan informasi yang terbuka kepada publik siapa saja pengusaha besar yang terlibat dalam rente perdagangan beras ini, jangan hanya membabi buta menantang pasar beras dengan operasi pasar yang tidak terbatas. Justru langkah yang harus diambil adalah melakukan pelarangan impor beras yang tidak terbatas.

*Ketiga*, selain menertibkan pengusaha beras dan penggilingan Pemerintah juga berkewajiban membeli gabah petani yang mulai panen dan segera memberikan bantuan kepada petani yang mengalami kerusakan lahan dan puso. Kemudian harus ada arah kebijakan agar beras dapat dikontrol oleh pemerintah dan petani maka penggilingan padi dan jalur distribusi beras harus dimiliki, tidak dibiarkan dimonopoli oleh pengusaha besar.



## LAPORAN DARI NYELENI

# Forum Petani Untuk Kedaulatan Pangan Dunia

(Bagian 1 dari 2 tulisan)

■ MOHAMMAD IKHWAN

Tahun 2006 lalu adalah sepuluh tahun masa setelah ditegaskannya komitmen negara-negara untuk menghapuskan setengah kelaparan dunia (*halving the hunger*). FAO dalam *World Food Summit* 1996 menegaskan—tentunya dengan paradigma ketahanan pangan (*food security*). Masalah muncul ketika problem ini ternyata tak terpecahkan, bahkan jauh sebelum komitmen 1996 tersebut. Apapun upaya tripartit; sebutlah demikian—pemerintah, rakyat dan perusahaan—tak bisa mencapai rakyat kecil, yaitu 850 juta rakyat dunia yang saat itu menghadapi masalah rawan pangan. Revolusi hijau, revolusi putih, dan revolusi pangan lain ternyata bukan jawaban. Jumlah rakyat lapar di dunia malah meningkat, menembus angka 920 juta rakyat per 2006.

Masalah pemerintah, rakyat dan perusahaan ini jika ditilik ternyata bukanlah hubungan yang simetris. Rakyat tidak menjadi unsur utama, bahkan cenderung dilupakan. Bisa dilihat bahwa elemen rakyat: petani kecil, buruh, masyarakat adat, kaum migran, penggembala dan peternak, konsumen dan nelayan adalah pihak-pihak yang paling menderita selama ini. Ironis, karena dari beberapa dari sektor tersebut adalah produsen pangan yang paling mendasar bagi keluarga dan masyarakatnya.

Pada 1996 diajukanlah konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) oleh gerakan petani internasional La Via Campesina, yang mengungkapkan prinsip-prinsip praproduksi, produksi, distribusi dan konsumsi yang diinginkan rakyat. Hal ini juga berkaitan untuk melawan konsep ketahanan pangan yang selama ini dikooptasi dengan model mainstream neoliberal. Menurut saya, ada

beberapa isu sentral yang di-cover kedaulatan pangan pada pencetusannya awalnya: 1) akses sumber daya produktif yang harus dikuasai rakyat, seperti: tanah, air, benih, dan lainnya 2) melawan sistem perdagangan internasional yang menghalalkan impor murah dan dumping produk pangan 3) memperjuangkan pasar yang adil karena kendali distribusi dan pasar cenderung dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan raksasa, sementara pasar lokal dan domestik terlupakan.

Konsep ini menjadi sebuah alternatif yang dianggap membawa pesan baru bagi tata dunia yang penuh ketidakadilan kala itu. Hal ini sekaligus juga sebagai bentuk perlawanan nyata bagi rejim perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), rejim finansial IMF dan Bank Dunia, yang marak di era pertengahan 1990-an. Banyak dari organisasi rakyat di tingkat nasional, regional maupun internasional yang mengkaji lebih lanjut dan mempromosikan konsep ini, dan perjuangan terus berlanjut hingga mencapai titik terang pada beberapa bulan belakangan ini: legitimasi IMF berkurang, negosiasi WTO yang mati suri sejak Juli 2006, dan diadopsinya konsep-konsep rakyat oleh negara-negara tertentu (Venezuela, Kuba, Bolivia, Nepal, Brazil, dan lainnya) serta berkembangnya sistem perdagangan berbasis solidaritas (ALBA).

Di tahun 2006, digagaslah sebuah forum rakyat yang direncanakan mewadahi perjuangan kedaulatan pangan ini. Pertemuan ini diadakan di Mali, Afrika Barat—salah satu negara yang telah mengadopsi kedaulatan pangan. Mali juga dianggap sukses

berpihak kepada petani, dengan mencantumkan kedaulatan pangan tersebut dalam konstitusinya.

Forum ini akhirnya digelar pada 23-27 Februari 2007 ini, dengan nama Nyeleni. Nama ini diambil dari seorang petani perempuan yang perjuangannya sangat melegenda dan membudaya di tanah Mali. Dalam penuturan Ibrahim Coulibaly, pemimpin organisasi petani di Mali, disebutkan bahwa Nyeleni adalah petani perempuan yang teguh dan ulet. Pada masa hidupnya, Mali adalah negara yang tandus dan gersang. Karenanya, tak ada yang sanggup memproduksi pangan yang cukup walau hanya untuk konsumsi keluarga. Namun Nyeleni dengan teguhnya terus bertani dengan memanfaatkan kearifan lokal dan tradisinya, membangun sistem air yang bisa dinikmati bersama komunitasnya, sehingga terbangun pertanian pangan yang menakjubkan dari tangan perempuan ini. Cerita-cerita rakyat juga mengatakan, bahwa tanah-tanah yang dulunya kering akhirnya bisa menjadi subur atas upaya Nyeleni. Orang-orang setempat pun mengakuinya sebagai perlambang Dewi Kesuburan, kira-kira seperti tradisi Indonesia meyakini Dewi Sri.

Untuk menampung sekitar 600 orang dari seluruh dunia dalam forum ini dibangunlah sebuah desa kedaulatan pangan di tepi danau Selingue, yang juga diberi nama sama dengan forum ini. Tentang peserta jangan salah duga dulu, karena 600 partisipan ini adalah pilihan dari pejuang-pejuang kedaulatan pangan yang mewakili organisasi yang sejauh ini konsisten mempromosikan kedaulatan pangan dan aktif dalam gerakan rakyat. Forum ini bukanlah



Suasana Forum Kedaulatan Pangan Nyeleni 2007 di Bamako, Mali

Dok.FSPI

forum terbuka seperti World Social Forum (WSF), yang dikritik terlalu 'becak' hingga mengakomodir kepentingan individu dan organisasi yang bahkan tidak ikut memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tujuan dari forum ini adalah untuk memperdalam arti kedaulatan pangan bagi rakyat, terutama oleh organisasi-organisasi yang selama ini aktif memperjuangkan kedaulatan pangan. Kemudian, perlu dipikirkan juga wadah-wadah perjuangan yang perlu dipertahankan atau dibuat, seperti membangun aliansi yang lebih luas. Selanjutnya, akan diatur rencana-rencana aksi, strategi bersama, dan komitmen bersama untuk perjuangan yang lebih hebat lagi.

Terlepas dari masalah teknis yang masih sedikit mengganjal seperti listrik, sanitasi dan pembangunan desa yang belum sepenuhnya selesai, forum Nyeleni ini mendapat respon yang cukup meriah dari gerakan rakyat di seluruh dunia. Bahkan beberapa perwakilan negara disebut-sebut akan menghadiri puncak pembicaraan gerakan rakyat mengenai kedaulatan pangan ini. Sebut saja Presiden Venezuela Hugo Chavez, Presiden Bolivia Evo Morales, Presiden Mali Amadi Toure, tokoh gerakan petani dan calon presiden Perancis Jose Bove, dan wakil dari

parlemen Nepal. Yang disebut dua pertama akhirnya gagal hadir—walaupun Chavez mengirimkan video dukungan bagi kedaulatan pangan di akhir forum—sementara yang lainnya akhirnya datang. Belum juga termasuk pemimpin-pemimpin gerakan petani, buruh, nelayan, migran, masyarakat adat, penggembala dan konsumen dari seluruh dunia.

**Sektor dan Isu**  
Di tahun 2002, FAO menggelar *World Food Summit 5 Years Later*, yang menandakan pendirian negara-negara untuk melawan kelaparan. Di peringatan yang sama pula, gerakan rakyat terutama dari petani—La Via Campesina—mengingatkan bahwa mustahil mencapai tujuan mengurangi setengah jumlah kelaparan pada tahun 2015. Alasannya karena ada masalah-masalah mendasar yang belum menjadi komitmen pemerintah dan lembaga-lembaga internasional. Masalah selanjutnya lagi, target itu tentunya kurang realistis mengingat sudah lima tahun digelar namun targetnya relatif tidak tercapai. Masalah-masalah mendasar inilah yang dipertanyakan oleh gerakan rakyat, karena sesungguhnya dari segi produktivitas ternyata stok pangan

dunia meningkat namun jumlah rakyat yang rawan pangan cenderung bertambah (La Via Campesina, 2002). Dalam penuturan Peter Rosset, dari tata niaga pangan dunia ternyata ada yang tidak beres. Harga produk pertanian mentah rata-rata dari petani cenderung menurun, namun harga produk keluaran rata-rata industri pangan/pengolahan perusahaan transnasional cenderung meningkat (Rosset, 2006).

Belum lagi masalah ketidakadilan akses rakyat terhadap sumber daya produktif (lahan, air, benih, dan sebagainya). Isu reforma agraria sejati adalah isu yang mengemuka dalam problem ini—dan sudah menjadi tekanan gerakan rakyat, terutama petani dan masyarakat adat dalam semboyan *land, territory and dignity*. Sebelumnya ada pencapaian besar dari tekanan gerakan rakyat, yakni diadopsinya reforma agraria dan kedaulatan pangan dalam dokumen International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD), yang dilaksanakan FAO pada tahun 2006 lalu di Brazil. Namun sayangnya komitmen ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, jadi tidak bisa dipaksakan kepada negara yang belum melaksanakannya.



Doc. FSP

# Dari Nairobi

■ TRI INDANA

WILDA TARIGAN

Pada tanggal 27 Januari lalu, sehari setelah menghadiri Forum Sosial Dunia (WSF), sebuah forum berkumpulnya organisasi gerakan sosial dari seluruh dunia yang diadakan di ibu kota Kenya, Nairobi, para delegasi dari beberapa negara melakukan kunjungan ke areal pertanian. Para delegasi mengunjungi sebuah tempat di pedalaman Afrika sana yang bernama desa Murangan Kikuru sekitar 50 km dari Nairobi.

Di negara yang dihuni 32 juta penduduk ini, rombongan mengunjungi para petani yang tergabung dalam organisasi petani *Kangema Concerned Mother* (Kenfap). Basis dari komunitas Kenfap adalah petani di divisi Kangema distrik Muranga Kikuru.

Kenfap sendiri terbentuk pada tahun 2001. Organisasi ini pada awalnya hanya beranggotakan 493 orang, namun kini total anggotanya mencapai 1200 orang yang terdiri dari 65 kelompok. Mayoritas anggota Kenfap adalah perempuan, akan tetapi tidak tertutup bagi petani laki-laki untuk turut jadi anggota.

Menurut Prisca, salah satu pemuda tani dan koordinator petani perempuan menyatakan bahwa tujuan utama organisasi Kenfap adalah memerangi kemiskinan dan kekerasan rumah tangga, meningkatkan nutrisi untuk membantu penderita HIV/ AIDS, meningkatkan perekonomian perempuan yang hidup pada status sosial rendah dan mencoba

meniadakan batas antara si kaya dan si miskin. Salah satu program yang sedang dikembangkan organisasi ini adalah berusaha untuk menerapkan sistem pertanian baru, dan berjuang untuk kesejahteraan anggotanya.

Kebanyakan dari komunitas anggota Kenfap mengelola kebun nanas, beternak lebah dan domba. "Menanam nanas sangat membantu mensejahterakan keluarga kami, karena buah ini sangat laku di pasaran walaupun harganya kurang begitu memuaskan. Ketika musim mangga tiba, kami juga dapat penghasilan dari situ, karena mangga juga banyak digemari. Harga 1 mangga pun lumayan, sekitar 10-15 shilling (sekitar 1500-2000 rupiah per buah). Keluarga kami biasanya

tinggal di sekitar kebun agar mudah untuk merawatnya. Itulah salah satu alternatif dalam mengatasi kesulitan kam. Walaupun demikian kami tetap menanam tanaman pokok, seperti jagung dan umbi-umbian," demikian Prisca menggambarkan.

Saat ini beberapa prestasi organisasi telah dicapai anggota Kenfap di distrik Muranga Kikuru, seperti memiliki hewan ternak yaitu domba dengan jumlah 1200 ekor senilai 3,6 juta silling. Setiap anggota memiliki tangki air dari kas mereka.

Rombongan juga sempat mengunjungi sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian kota. Di sana terdapat dua petak lahan sayuran milik Kenfap. Lahan ini ditanami cabai dan kol. Mereka menyewa lahan pada seorang tuan tanah dengan harga murah karena terletak jauh dari kampung dan saluran irigasi sangat sulit.

Dengan lahan ini mereka bisa menghasilkan keuntungan yang lebih untuk kas organisasi. Biasanya hasilnya digunakan untuk biaya pertemuan kelompok. Hanya saja lahan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan pasar yang sangat tinggi. Kesulitan yang mereka hadapi adalah tentang irigasi, karena daerah ini termasuk daerah yang sangat kekurangan air. Dan mereka juga sulit untuk mendapatkan tanah yang cocok untuk ditanami sayuran.

Kalaupun ada, sewanya sangat mahal dan tidak sebanding dengan hasil pertanian mereka.

Dalam kesempatan lain Leonida, seorang perempuan yang tergabung dalam *Ebony Youth & Orphans Support Initiative Kenya*, mengatakan bahwa perempuan di Kenya tidak memiliki hak atas tanah. Yang berhak memiliki tanah adalah laki-laki. Walaupun dalam keluarga mereka tidak ada anak laki-laki, status kepemilikan tanah tetap harus pada laki-laki. Jika kepala keluarga (ayah) mereka meninggal, kerabat laki-laki yang jauh bisa menggugat tanah tersebut. Perempuan hanya bisa mengelola tapi tidak bisa memiliki tanah. Bisa dibayangkan bagaimana nasib petani perempuan Kenya.

Padahal jika dilihat lebih jauh lagi, kondisi geografis Kenya sangat potensial untuk pertanian. Masih banyak lahan kosong yang tidak dioptimalkan, mereka hanya menggunakan lahan tersebut sebagai lahan gembala.

Suku yang menduduki daerah kosong di distrik Muranga Kikuru adalah suku Massai, salah satu suku penduduk asli Kenya. Budaya mereka bertani dan beternak, biasanya masyarakat suku Massai membangun rumah menggunakan tanah merah dengan tiang penyangga bambu atau kayu. Ukuran rumah utama sekitar dua belas meter per segi, dan di

sebelah kanan atau kiri bangunan terdapat ruang untuk kandang sapi atau domba.

Meskipun secara kesehatan mereka sangat kurang, tapi mereka tetap percaya bahwa ini sebagai bentuk pengabdian terhadap tradisi warisan leluhurnya.

Perempuan di Kenya tidak memiliki hak atas tanah. Yang berhak memiliki tanah adalah laki-laki. Walaupun dalam keluarga mereka tidak ada anak laki-laki, status kepemilikan tanah tetap harus pada laki-laki. Jika kepala keluarga (ayah) mereka meninggal, kerabat laki-laki yang jauh bisa menggugat tanah tersebut. Perempuan hanya bisa

Bagi suku Massai, hewan ternak mereka adalah harta yang sangat berharga, karena sebagai sumber makanan mereka. Suku Massai mempunyai kebiasaan makan daging sapi atau domba dan minum susu sebagai hidangan pokok. "Jika saya pergi ke suatu tempat dan tidak disuguhin susu, lebih baik saya pulang dan saya akan memeras sapi saya untuk diambil susunya dan saya minum," kata salah seorang petani perempuan Kenya yang ditemui rombongan.

Doc. FSPI



## AGRARIA

# Penangkapan di Jampang Melanggar Hak Asasi Petani

Sabtu (24/2), Oman 35 tahun, petani warga Jampang, Desa Cilangkap, Kabupaten Sukabumi dicitrak oleh aparat Polres Sukabumi dengan tuduhan melakukan pengrusakan dan memasuki lahan perkebunan tanpa izin. Padahal Oman hanya bermaksud menanam lahan pertanian yang sudah menjadi haknya.

Lahan pertanian tersebut merupakan lahan masyarakat yang diberikan pemerintah. Berawal pada tahun 1999, ketika pemerintah berinisiatif merelokasi warga korban musibah longsor ke tempat yang lebih manusiawi.

Melalui kesepakatan antara Perkebunan Tugu Cimenteng, masyarakat, dan Muspika Lengkong serta Kepala Dusun Cilangkap, berdasar SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 593/1227/Dekon tertanggal 22 Mei 2001, diputuskan bahwa warga

memperoleh tanah di atas areal perkebunan dengan luas tanah kurang lebih 200 meter per segi untuk setiap kepala keluarga, dan juga ditunjang dengan fasilitas sosial serta fasilitas umum.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, karena kebutuhan akumulasi kapital, tiba-tiba pihak perkebunan memerintahkan agar seluruh warga segera angkat kaki. Mereka mengklaim lahan yang diduduki warga termasuk Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan. Hanya saja masih menjadi pertanyaan besar tentang luas serta status HGU yang dikuasai perkebunan. Pasalnya, dari pihak perkebunan, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, selalu menutupi perihal HGU Perkebunan Tugu Cimenteng.

Kondisi seperti itu jelas sangat mengganggu warga yang sudah

mengolah lahan tersebut menjadi lahan pertanian. Ketegangan antara warga dengan perusahaan perkebunan tak terhindarkan. Puncaknya, ketika warga bersikeras tidak mau meninggalkan lahan, pihak perkebunan kemudian meminta bantuan kepolisian (Polres Sukabumi) untuk melakukan tindakan-tindakan represif.

Pada hari Sabtu 24 Februari lalu, beberapa aparat kepolisian datang menyisir desa, dengan misi mencari empat orang warga yang dianggap sebagai motor gerakan petani setempat. Di lokasi, polisi hanya mendapati Oman. Saat itu juga Oman ditangkap.

Setelah menangkap Oman, aparat polisi mengancam bakal menangkap seluruh warga kampung, kecuali mereka bersedia menandatangani pernyataan sudi pindah dari lahannya. "Seolah-olah aparat kepolisian telah menjadi centeng perkebunan, karena bersedia repot-repot mengurus perihal kepindahan warga dari lahan," tutur Gunawan kepala Divisi Kajian dan Kampanye Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Sementara itu, Deputi Politik dan Jaringan FSPI, Agus Rully menambahkan, dengan adanya peristiwa Jampang dan konflik agraria di tempat lainnya, semakin memperteguh bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok Agraria (UUPA 1960) harus segera di tegakkan. "Artinya, pemerintah harus segera menentukan mana tanah untuk pertanian, industri, pemukiman, wilayah pertahanan dan sebagainya. Sehingga sedari awal konflik penggunaan lahan bisa dihindarkan dan rencana umum tersebut harus dimaksudkan dalam rangka mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat," tegas dia.



Masyarakat Desa Cilangkap, Jampang, Kabupaten Sukabumi, sedang berembuk membicarakan penangkapan petani. Mereka mencurigai pihak perusahaan perkebunan menjadi dalang penangkapan tersebut. Rabu (28/2).

## SPSU

# Pertemuan Kader Petani Perempuan

Serikat Petani Sumatera Utara menggelar pertemuan tahunan kader petani di dusun Dusun Penggantian, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 29-30 Januari lalu. Pertemuan kader petani perempuan ini bertujuan untuk memetakan masalah-masalah petani perempuan dan merumuskan program kerja petani perempuan ditingkat Organisasi Tani Lokal (OTL).

Adapun peserta yang ikut dalam pertemuan ini adalah kader petani perempuan di OTL dan Koordinator BKPP Unit yang sudah terpilih. Pertemuan yang dilaksanakan selama

dua hari ini dihadiri oleh 16 kader petani perempuan.

Koordinator Badan Koordinasi Petani Perempuan (BKPP) SPSU, Yuliana, pada keempat pembukaannya menyatakan bahwa target pertemuan tersebut antara lain adalah ditemukannya data konkrit masalah spesifik petani perempuan ditingkat OTL dan Unit, serta menyusun program kerja petani perempuan.

Sementara itu, Sekjen SPSU Wiwiek M Kristina menjelaskan kembali sejarah perjuangan SPSU dan perubahan struktur SPSU, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya,

penjelasan sejarah itu dinilai perlu untuk menggugah semangat perjuangan kaum perempuan dalam berorganisasi.

Hasil dari pertemuan selama dua hari ini antara lain potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di kelompok. "Nantinya potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dan membantu anggota kelompok dalam menggali sumber-sumber logistik," ujar Yuliana. Lebih jauh Yuliana mengatakan banyak potensi alam dan keahlian yang dimiliki oleh kader petani perempuan di SPSU belum tergali secara optimal.

Chasput Chairu Hasibuan



## SPSB

## Menegakkan Hak Asasi Petani

Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB) bersama akademisi, Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan mahasiswa bertekad untuk menegakkan hak asasi petani. Hal itu tercantum dalam seminar "Penegakkan Hak Asasi Petani untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan" di gedung pertemuan balitbang Sumatera Barat akhir tahun lalu.

"Kasus-kasus kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap perjuangan kaum tani dalam mempertahankan sumber

kehidupannya dari caplok perusahaan perkebunan besar merupakan pelanggaran HAM, kasus-kasus ini harus diselesaikan apabila demi terwujudnya kedaulatan pangan rakyat," tutur Rustam pengurus SPSB.

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan tiga tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk: *pertama*, pemerintah harus melaksanakan Undang-undang pokok agraria tahun 1960. *Kedua*, pemerintah harus mengakui dan menghormati hak asasi petani. *Ketiga*, pemerintah harus

mengevaluasi HGU yang ada karena HGU merupakan salah satu faktor terjadinya penindasan terhadap petani. *Keempat*, hentikan kriminalisasi terhadap perjuangan petani dalam memperjuangkan kehidupan yang layak. *Kelima*, negara harus berpihak kepada petani karena Indonesia adalah negara agraris dan sektor pertanian seharusnya mendapat skala prioritas utama. *Keenam*, membangun organisasi tani yang kuat dan terdidik guna mewujudkan reforma agraria sejati.

Rustam Efendi

## SP JATENG

# Deklarasi Serikat Petani Kudus

Ali Fahmi/FSPI.doc



*Pembacaan naskah deklarasi Serikat Petani Kudus di Desa Terbang, Kabupaten Kudus, Sabtu (10/2).*

Para petani dari 14 kelompok tani se-Kabupaten Kudus mendeklarasikan berdirinya Serikat Petani Kudus (Serta Kudus) di Dukuh Ngrangit, Desa Terbang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada hari Sabtu (10/2).

Dalam deklarasi tersebut, Presidium FSPI yang juga menjabat Ketua Serikat

Petani Jawa Tengah (SP Jateng) Ahmad Somaeri melantik Sukowati sebagai Sekjen Serta Kudus. Deklarasi disaksikan oleh Sekjen FSPI Henry Saragih, Presidium FSPI Ahmad Somaeri, anggota Majelis Pimpinan Tertinggi Petani (MPTP) FSPI Sugiatmo dan Rois Nur. Dalam acara tersebut hadir juga Kepala Dinas Pertanian Kudus, Dekan Fakultas Pertanian Muria Kudus dan perwakilan Polsek setempat.

Selain deklarasi organisasi tani, digelar juga acara dialog interaktif bertemakan "Memberdayakan Gerakan Petani". Henry Saragih, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kudus dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus bertindak selaku pembicara.

Dalam paparannya, Henry mengingatkan kembali komitmen pemerintah untuk melaksanakan Program Pembaruan agraria Nasional.

"Program tersebut jangan hanya menjadi gincu saja, tetapi harus benar-benar dilaksanakan. Kami, organisasi petani akan terus menuntut agar

pembaruan agraria benar-benar dilaksanakan sesuai dengan UUPA 60," tegas Henry.

Menurut Henry, pembaruan agraria yang diinginkan petani, khususnya yang tergabung dalam FSPI adalah penyelesaian konflik agraria yang terjadi sejak tahun 1980-an sebagai akibat dari gerak laju pembangunan.

"Berikan tanah untuk petani. Kembalikan tanah-tanah rakyat yang diambil perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan atau instansi-instansi lainnya untuk dikelola petani," ujar Henry.

Henry optimis, pembaruan agraria akan berjalan dengan baik bila kaum tani terus menerus melakukan desakan di setiap daerah. "Makanya hari ini kami mendeklarasikan Serikat Tani Kudus, untuk menyuarakan perjuangan tersebut agar mendapat tanggapan dan tindak lanjut pemerintah," Henry menegaskan.

CECEP RISNANDAR | JPNN

## Solidaritas FSPI Untuk Korban Banjir Jakarta

Minggu (4/2), tim solidaritas kemanusiaan FSPI menerjunkan relawannya untuk menggalang bantuan kepada korban banjir di Jakarta. Bantuan bahan makanan dan perahu karet diberikan kepada korban banjir di dua wilayah di Jakarta. Bantuan pertama ditujukan kepada kaum buruh di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat. Bantuan kedua ditujukan kepada masyarakat Rawa Mangun, Jakarta Timur.

Bantuan di Daan Mogot dikoordinasikan bersama Serikat Buruh Jabotabek (SBJ),

sedangkan di Rawa Mangun dikoordinasikan bersama Karang Taruna setempat. Bantuan yang disalurkan tim solidaritas kemanusiaan FSPI antara lain, Beras 0,5 ton sayur-sayuran, ikan asin, minyak goreng, dan menyediakan 2 perahu karet sebagai sarana transportasi bantuan.

"Bantuan ini adalah bentuk solidaritas kaum tani kepada saudara-saudaranya yang berada di perkotaan yang terkena bencana banjir," tutur Sekjen FSPI Henry Saragih, menanggapi aksi



*Relawan penanggulangan bencana banjir mendistribusikan bantuan di wilayah Cakung, Jakarta Barat, Minggu (4/2).*

tim solidaritas kemanusiaan yang diterjunkannya.

Hujan yang mengguyur Jakarta sejak akhir Januari lalu menyebabkan tergenangnya sebagian wilayah dan lebih dari

200 ribu orang mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Sebagian diantaranya mengungsi ke kolong-kolong jalan tol, halte bus way dan tempat-tempat yang tidak layak lainnya. (CR)

Achmad Ya'kub/Pembaruan Tani